ANTI KORUPSI

MEI 2025

NANI RUKMANAH

RS SOEHARTO HEERDJAN

NANI RUKMANAH

Auditor Madya

Kepala Satuan Pengawas Internal

RS Soeharto Heerdjan Jakarta

nanir66.nr@gmail.com

13246733

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nani Rukmanah

HASIL PEMBELAJARAN

Peserta Diharapkan Mampu

1. **Memahami Antikorupsi**
2. Mengenali dampak korupsi
3. Mengetahui Upaya Pemberantasan Korupsi
4. Memahami Membangun Sikap Antikorupsi

Kemenkes

POKOK BAHASAN & SUBPOKOK BAHASAN ANTI KORUPSI

I. KONSEP ANTIKORUPSI

1. Pengertian, faktor-faktor, dan teori penyebab korupsi
2. Delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya
3. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia
4. Perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan suap

II. BAHAYA DAN DAMPAK KORUPSI

5. Bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor
6. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi

III. MEMBANGUN SEMANGAT PERLAWANAN TERHADAP KORUPSI

7. Strategi pemberantasan korupsi
8. Referensi pengukuran tingkat korupsi
9. Referensi, role model Negara/ daerah /instansi, individu yang antikorupsi

IV. MEMBANGUN SIKAP ANTI KORUPSI

10. Integritas dan nilai-nilai antikorupsi

Kemenkes

DASAR HUDASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Pembukaan & Batang tubuh UUD 1945
2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1988 tentang Pengelolaan Negara yang bersih & bebas KKN
3. UU No. 31 2019 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 19 Tahun 2019, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

ASAL KATA

B. Latin :Corruptio- corruptus;
B. Inggris :Corruption, corrupt;
B. Prancis :Corruption
B. Belanda:corruptie(Korruptie

Harfiah :
Kebusukan,Kerusakan,Kebejatan,
Ketidakjujuran,Dapat disuap,
Tidak bermoral

Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan Melawan Hukum Dengan Maksud Memperkaya Diri Sendiri/ Orang Lain, Baik Perorangan Maupun Korporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara

Transparency International (TI).

Perilaku Pejabat Publik, Politikus, Atau Pegawai Negeri, yang Secara Tidak Wajar dan Legal Memperkaya Diri atau Memperkaya Mereka yang dekat dengan Kekuasaan, dengan cara Menyalahgunakan Kekuasaan Publik Yang Dipercayakan Kepada Mereka

DEFINISI KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA

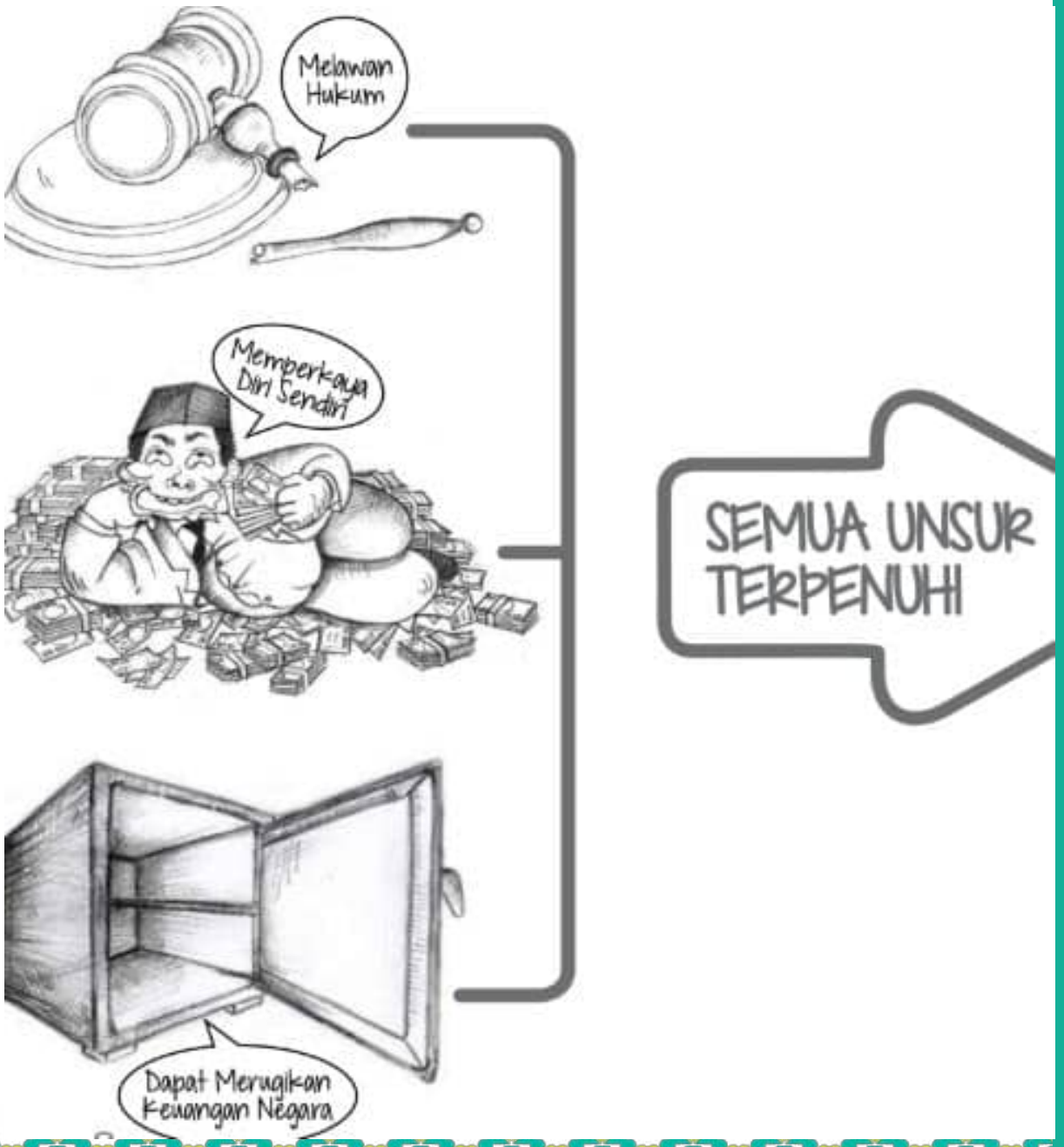
Melawan Hukum
Memperkaya Diri Sendiri
Dapat Merugikan Keuangan Negara
SEMUA UNSUR TERPENUHI

KORUPSI

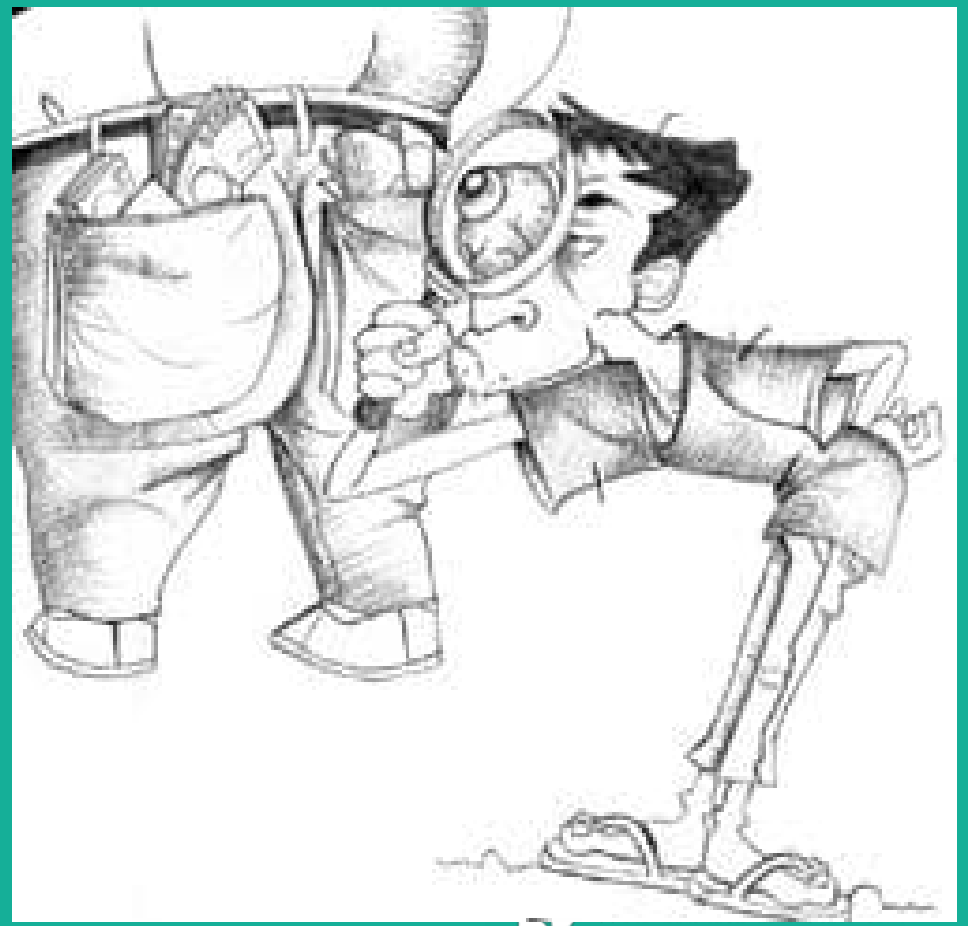

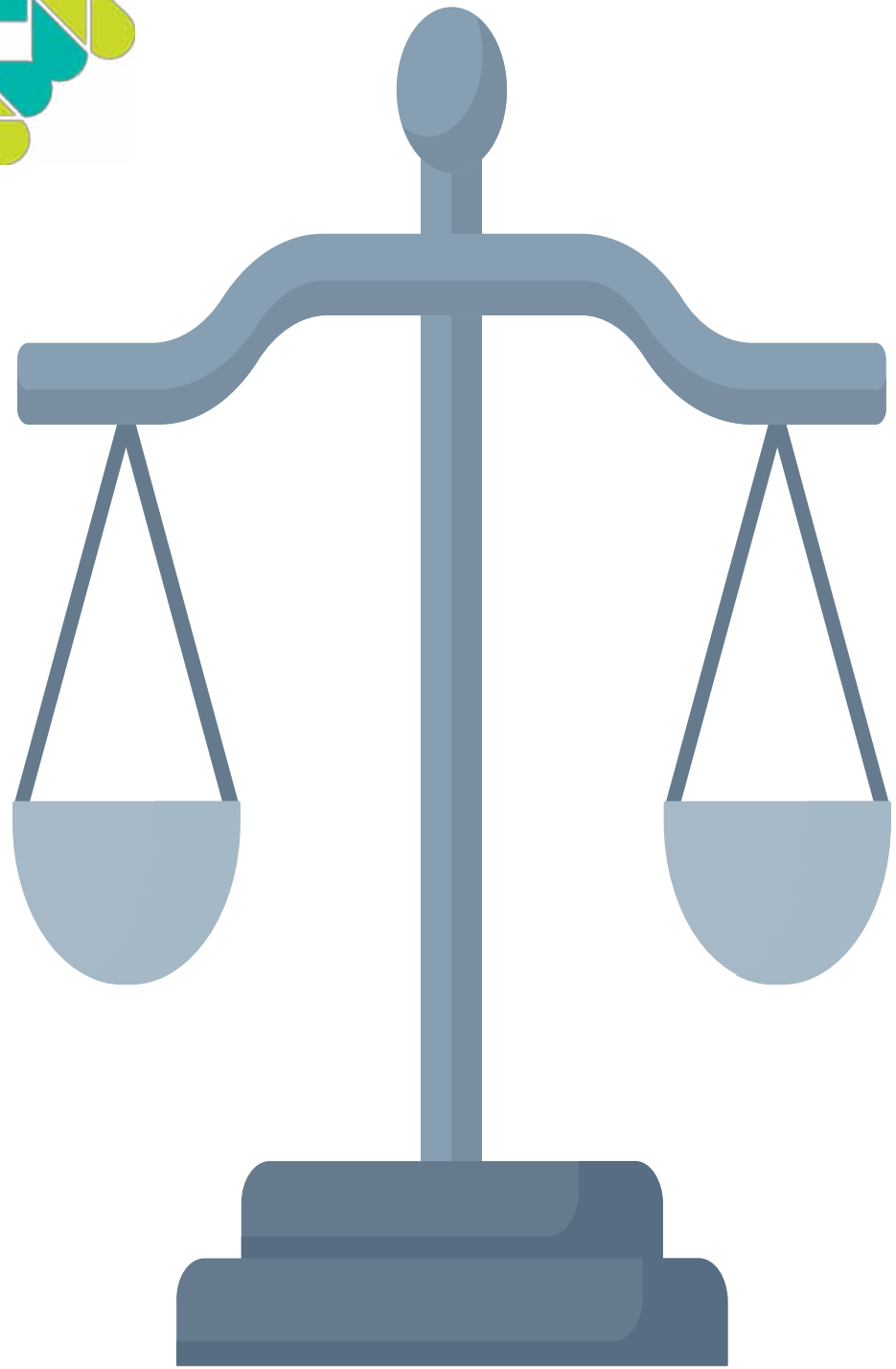

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI (GONE THEORY)

1. Greeds (keserakahan): perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. Opportunities (kesempatan): keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan
3. Needs (kebutuhan): faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. Exposures (pengungkapan): tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan

(Jack Bologne)

30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001)

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Pasal 2; Pasal 3)
Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10)
maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.

PERBUATAN CURANG
Pasal 7ayat 1a,b,c pasal 2,dan pasal 12h
ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta

PEMERASAN
Pasal 12;e,g,h
Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
Pasal 12 huruf i.
ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar

Penyuapan
Pasal 5,6,11,1213
Menerima suap Maksimal penjara 5 tahun atau denda Rp 250 juta.
Menyuap3-15 Th Atau Denda 150-750 Juta

GRATIFIKASI
ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar

Dari 30 Jenis Delik Di Atas, Yang Cukup Sering Dijumpai Di Dunia Usaha : Pemerasan Dlm Jabatan; Penyuapan; Benturan Kepentingan & GRATIFIKASI

Kemenkes

PERBEDAAN SUAP, PEMERASAN DAN GRATIFIKASI

	SUAP	PEMERASAN	GRATIFIKASI
1	Pemberi aktif menawarkan imbalan	Penerima aktif meminta imbalan	Pemberi yang berinisiatif memberikan hadiah
2	Ada kesepakatan 2 pihak (meeting of minds)	Pemberi memberikan imbalan krn terpaksa	Tdk ada kesepakatan sebelumnya
3	Pemberi dan penerima dapat dipidana	Pemberi tidak dapat dipidana	Pemberi dapat dipidana (debatable);
4			Penerima dipidana jika tdk melaporkan dlm wkt 30 hari kerja

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Kemenkes

BAHAYA dan DAMPAK KORUPSI
DALAM BERBAGAI SEKTOR

DAMPAK MASIF KORUPSI

4 POTENSI INDONESIA???

1. POSISI STRATEGIS

1. Negara Kepulauan
2. Antara Benua ASIA & Australia dan Samudra .Pasifik & S. Indonesia
3. Berbatasan 10 Negara
4. Menjadi Titik Persilangan Kegiatan Perekonomian Dunia.

2. POTENSI LUAS WILAYAH

1. Negara kepulauan terbesar di dunia, 13.466 pulau.
2. Luas daratan 1.922.570 km² dan
3. Luas perairan 3.257.483 km²
4. dari Sabang sampai Merauke, mencapai 5.120 kilometer

3. POTENSI KEKAYAAN ALAM

1. Keanekaragaman hayati (biodiversity) terlengkap di dunia
2. 100-150 genus dari tumbuhan 25.000 - 30.000 spesies
3. Hewan sekitar 220 ribu jenis
4. Potensi kehutanan, tambang , minyak ,gas bumi dll

4. POTENSI KEKAYAAN BAHARI

1. Diperkirakan mencapai enam kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya, sekitar Rp7.200 triliun per tahun
2. Produsen Ikan terbesar di dunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton

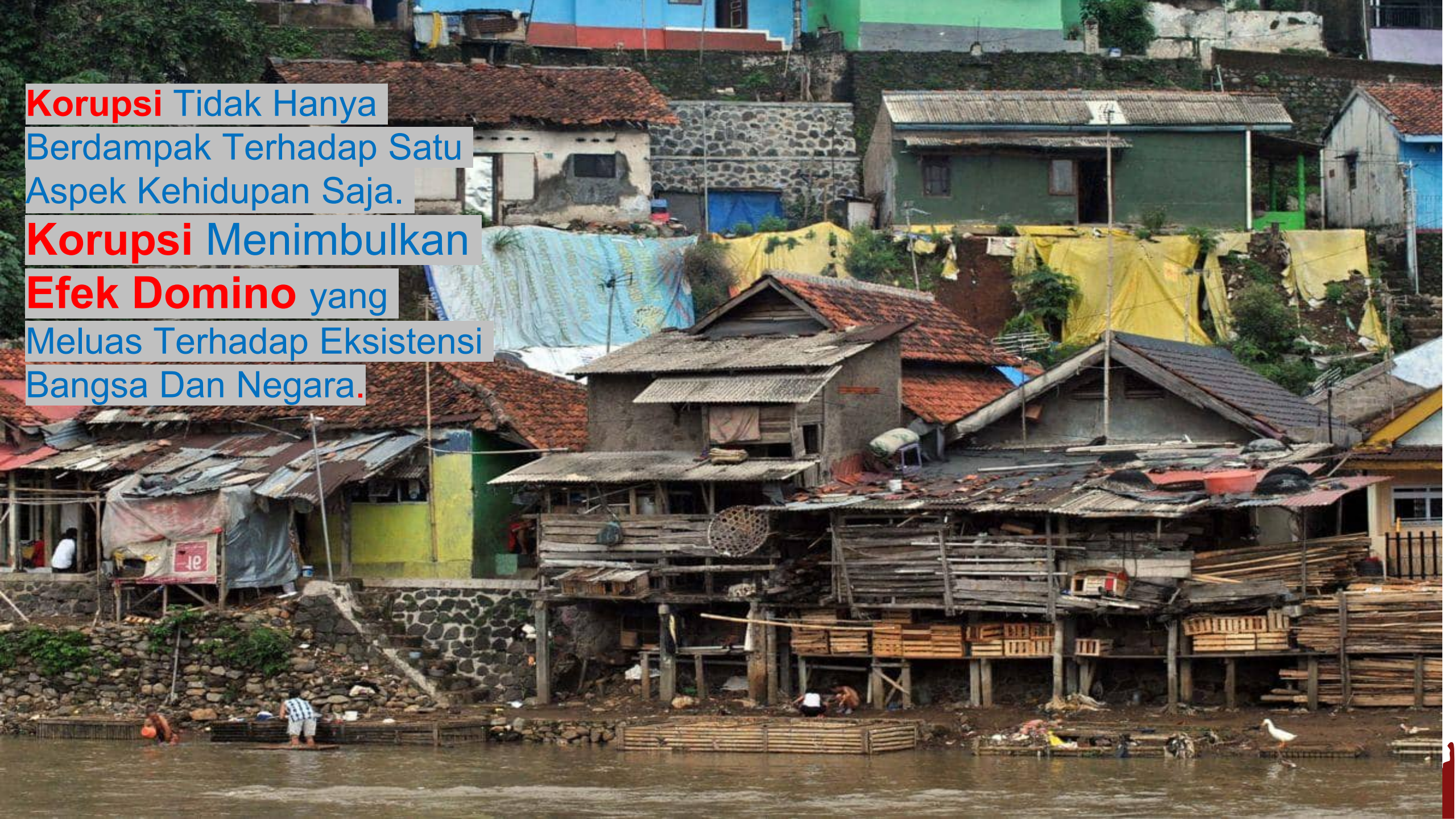
Korupsi Tidak Hanya
Berdampak Terhadap Satu
Aspek Kehidupan Saja.
Korupsi Menimbulkan
Efek Domino yang
Meluas Terhadap Eksistensi
Bangsa Dan Negara.

DAMPAK MASIF KORUPSI DALAM BERBAGAI SEKTOR

Bidang Pendidikan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyak sekolah rusak, dll

Bidang kesehatan: biaya kesehatan tinggi, angka kematian ibu hamil dan menyusui tinggi, tingkat kesehatan yang buruk, dll

Bidang ekonomi: harga-harga melambung, ekonomi biaya tinggi, persaingan pasar yang tidak sehat, dll

Bidang sosial: angka pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, riminalitas tinggi, kesenjangan antara kaya dan miskin tinggi, dll

Bidang pelayanan publik: tersendatnya pelayanan publik, sulitnya proses perizinan, menurunkan daya tarik investor, menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset. dll

Bidang lingkungan: banjir dan bencana alam, penggundulan hutan yang masif, mempercepat laju pemanasan global, ilegal loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah pertahun dll

Kemenkes

KOMPONEN BIAYA SOSIAL KORUPSI

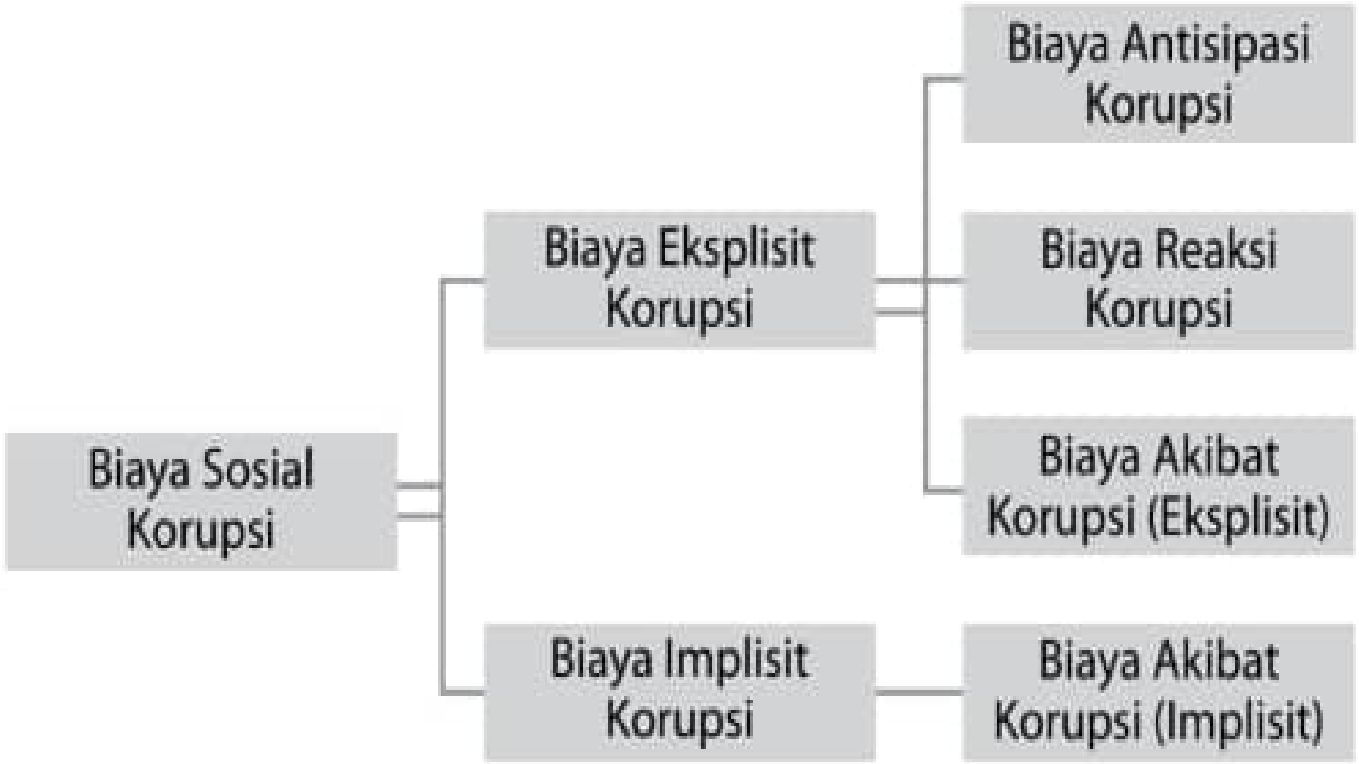

Kemenkes

HUBUNGAN ANTARA DAMPAK KORUPSI DAN BIAYA SOSIAL KORUPSI

BIAYA SOSIAL AKIBAT KORUPSI:

1. Biaya Penegakan Hukum
2. Pencegahan Korupsi
3. Biaya Penahanan dan Biaya Penjara
4. Biaya Pengadilan dan Biaya Jaksa

Hukuman finansial adalahgabungan nilai hukuman denda, hukuman
pengganti, dan perampasan barang bukti (aset).

Kemenkes

Biaya Sosial Korupsi

Efek Jera Yang Optimum ; Memperbesar Expected Cost Dari Koruptor,Hukuman Finansial Yang Diberikan Memperhitungkan Biaya Sosial Korupsi Dengan Mempertimbangkan Dampak Sosial Korupsi

Kasus dan masalah korupsi di Indonesia juga masih belum kunjung selesai.

kerugian negara akibat korupsi hanya dikembalikan sebesar 10,57% dalam bentuk hukuman finansial terhadap terpidana korupsi.

Karena nilai hukuman finansial yang jauh lebih rendah dari nilai yang dikorupsi menyebabkan uang yang dikorupsi tidak kembali sepenuhnya kepada negara.

BENTUK HUKUMAN INI TIDAK AKAN MEMBERIKAN EFEK JERA KEPADA KORUPTOR DI INDONESIA, BUKTINYA...

Sebagian besar uang rakyat yang dikorupsi tetap dinikmati koruptor meskipun koruptor telah dijatuhi hukuman.

Ini menunjukkan bahwa rakyat telah mensubsidi koruptor.

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kemenkes

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

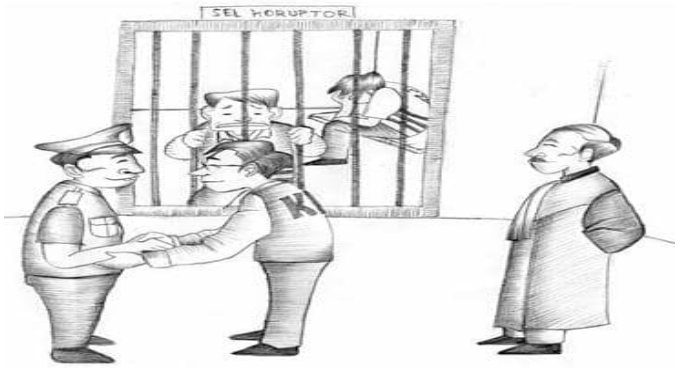

REPRESIF

Menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan.
Dalam strategi ini, Penanganan laporan Pengaduan masyarakat, Penyelidikan,Penuntutan, dan Eksekusi.

PERBAIKAN SISTEM

Penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervise pencegahan (korsupsi), serta Mendorong transparansi penyelenggara negara (PN).

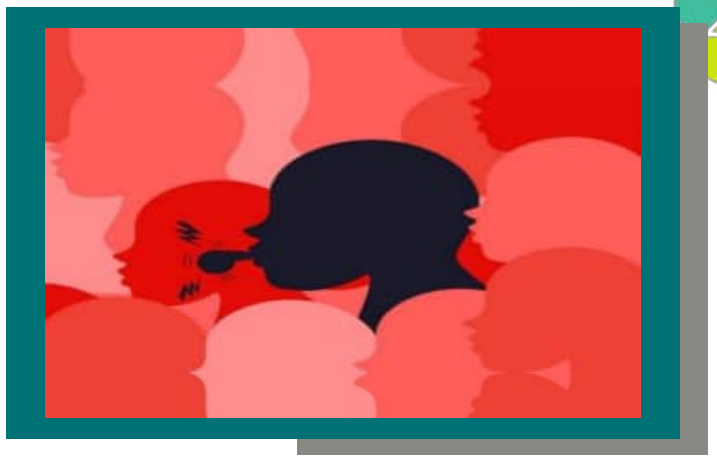

EDUKASI DAN KAMPANYE

Kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri.
Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.
Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.

Kemenkes

Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi

Siaran Pers 11 Feb 2025 • 2 min

Search

Score	Country	Rank
38	India	96
38	Maldives	96
37	Argentina	99
37	Ethiopia	99
37	Indonesia	99
37	Lesotho	99
37	Morocco	99
36	Dominican Republic	104
35	Serbia	105
35	Ukraine	105
	Algeria	107

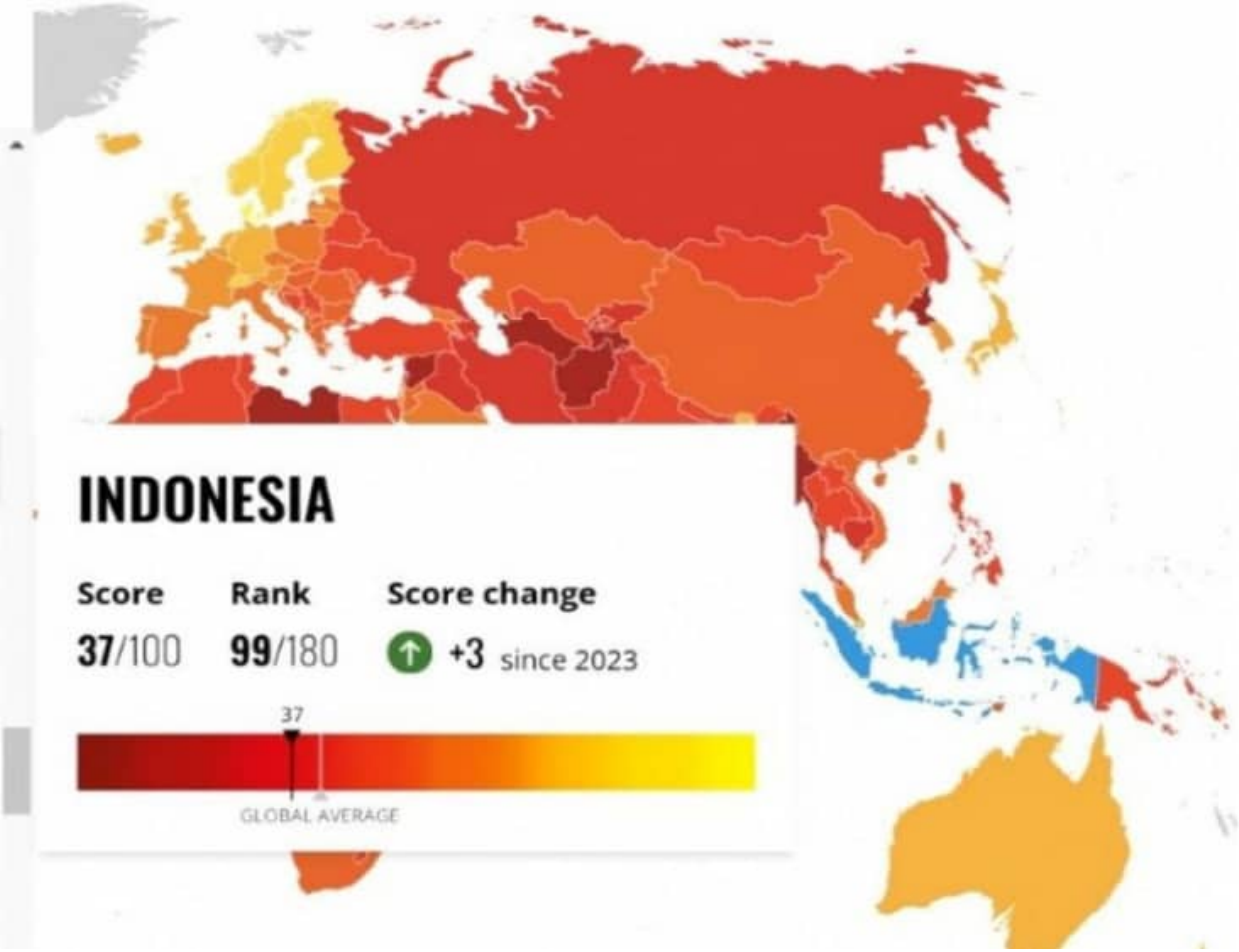

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 115.

TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA MASIH TINGGI

INTEGRITAS DAN NILAI – NILAI ANTIKORUPSI

Kemenkes

INTEGRITAS

Integritas Adalah Mutu, Sifat Dan Keadaan Yang Menggambarkan Kesatuan Yang Utuh Sehingga Memiliki Potensi Dan Kemampuan Memancarkan Kewibawaan Dan Kejujuran

Kemenkes

JUMAT BERSEPEDA KK

NILAI ANTIKORUPSI

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

NILAI – NILAI ANTIKORUPSI

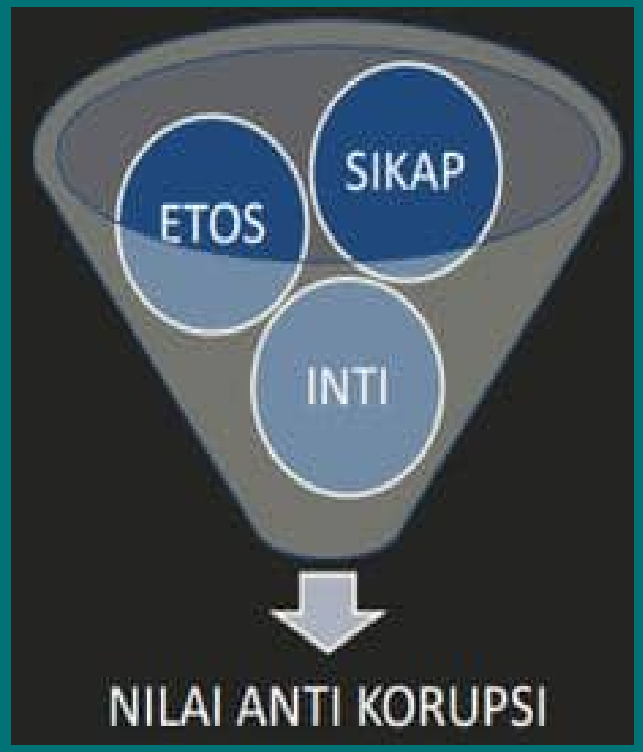

3 ASPEK NILAI–NILAI ANTI KORUPSI :

1. INTI ; Jujur,Disiplin, Tanggung Jawab
2. ETOS KERJA; Kerja Keras, Mandiri, Sederhana
3. SIKAP; Adil, Berani, Peduli

Kemenkes

SEMBILAN NILAI INTEGRITAS

NO	NILAI-NILAI	
1	JUJUR	Lurus hati, tidak berbohonh, tidak Curang
2	PEDULI	Mengindakan, Memperhatikan atau Menghiraukan Orang Lain
3	MANDIRI	Tidak Bergantung pada orang lain
4	DISIPLIN	Taat terhadap Peraturan baik yang tertulis maupuntidak tertulis
5	TANGGUNG JAWAB	Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan , tidak buang badan
6	KERJA KERAS	Gigih dan Fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan
7	SEDERHANA	Bersahaja, tidak berlebih-lebihan
8	BERANI	Mantap hati dan percaya diri,tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dsb
9	ADIL	Berlaku sepatutnya tidak sewenang-wenang

Kemenkes

TOKOH INSPIRATIF ANTI KORUPSI

BAHARUDDIN LOPA

Jaksa Agung Indonesia pada tahun 2001 & Menteri Kehakiman yang dikenal sebagai ikon anti korupsi. Lopa tidak gentar menangani kasus-kasus korupsi Tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih.

Menakar Dengan Pikir Dan Hati, Menolak ApaPun Yang Tak Masuk Dalam Takarannya.

Fasilitas Bukan Milik Pribadi. Tidak Mendamba Istana

MOHAMMAD HATTA

Wakil Presiden pertamamenteri luar negeri dan perdana menteri. Indonesia yang dikenal jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip

Setiap Perbuatan Adalah Demi Negara Yang Dicintai, Janganlah Berkhianat. Kembailkan Saja Uang Itu Demi Sebuah Rahasia Mimpi Tak Terbeli

H. AGUS SALIM

Tokoh bangsa yang dikenal berintegritas sejak muda. Genius , menguasdai 9 Bahasa Jaksa,Jurnalis Menteri LN, Bersahaja

Berdamai dengan Kemelaratan

HOEGENG IMAN SANTOSO

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5 (1968-1971) yang terkenal jujur dan anti korupsi. Hoegeng menolak suap dan lebih memilih hidup melarat

Pantang Terima Pemberian Karena Jabatan.

Tutupnya Toko Kembang Kami Itu Bukan Rumah Kami

MAR'IE MUHAMMAD

MantanMenteri Keuangan pada masa Kabinet Pembangunan IV yang dijuluki Mr. Clean karena gigih mempertahankan prinsip antikorupsinya.

Kemenkes

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemenkes

TERIMAKASIH

Kemenkes